PENGARUH KONFLIK SOSIAL-POLITIK TERHADAP HASIL PRODUKSI DAN INTERAKSI SOSIAL DI PERKEBUNAN AJINANTRA (1961-1970)

Abednego Andhana Prakosajaya dan Baskara T. Wardaya

Program Studi Sejarah dan Program Studi Magister Kajian Budaya,
Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
Surel: abednego.jaya@gmail.com dan magisterirb@usd.ac.id

ABSTRAK

Kegagalan operasi militer Gerakan 30 September 1965 di Jakarta telah mendorong terjadinya konflik yang diiringi aksi kekerasan massal di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satu lingkungan yang terdampak oleh konflik ini adalah perkebunan di Jawa Timur. Tulisan ini mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan pengaruh konflik pasca G-30-S di lingkungan Perkebunan Ajinantra, Jawa Timur, dengan fokus pada aspek ekonomi dan sosialnya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mencapai empat kesimpulan. Pertama, ditemui keterkaitan antara hasil produksi dengan kondisi interaksi sosial masyarakat Perkebunan Ajinantra. Kedua, hasil produksi dapat digunakan untuk menganalisis dinamika konflik yang terjadi dalam masyarakat perkebunan di Jawa Timur pasca G-30-S/1965. Ketiga, konflik dalam masyarakat perkebunan, terutama dalam kasus Perkebunan Ajinantra mengakibatkan penurunan interaksi sosial masyarakat perkebunan dan meningkatnya rasa curiga warga masyarakat terhadap sesama penghuni perkebunan. Keempat, di Jawa Timur terdapat upaya-upaya optimal untuk meminimalisasi dampak konflik sosial, sebagaimana tercermin dalam kasus Perkebunan Ajinantra.

Kata kunci: *konflik pasca G-30-S/1965, hasil produksi, interaksi sosial*

ABSTRACT

The failure of the 1965 30th of September Movement (also known as "G-30-S/1965") in Jakarta had triggered social conflict that led to mass violence in various regions of Indonesia. One of the sites where such social conflict took place was the Ajinantra Plantation in East Java. Issues raised in this article are pertaining to the impact of the post G-30-S/1965 conflicts in the East Java, with a case study on the economic and social aspects on the Ajinantra Plantation. This study uses historical research method with qualitative approach. It drew four conclusions as follow: First, there is a connection between production and the conditions of social interaction in East Java, as shown in the case of the Ajinantra Plantation community; second, production results can be used as a tool to analyze social conflicts as in the case of the Ajinantra Plantation after the failed G-30-S/1965 military operation; third, a social conflict can produce the a decreasing social interaction and increasing communal suspicion towards fellow members of a plantation community as shown in the Ajinantra Planttion community; fourth, optimal efforts were done to minimize the impact of the conflict as shown on the Ajinantra Plantation.

Keywords: *post G-30-S/1965 social conflict, production results, social interaction*

PENDAHULUAN

Naiknya pemerintahan Orde Baru di Indonesia diawali dengan kekerasan sosial-politik terhadap orang-orang yang diduga menjadi anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kekerasan itu dimulai pasca gagalnya sebuah operasi militer yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung di Jakarta. Tindakan operasi militer yang gagal tersebut diasosiasikan dengan PKI sebagai pelaku utama dalam operasi itu. Asosiasi itu selanjutnya diikuti dengan keputusan TNI Angkatan Darat dan sejumlah elemen masyarakat untuk mengambil tindakan kekerasan terhadap para korban, dengan dalih pembalasan dendam terhadap kematian para petinggi Angkatan Darat di Jakarta (Robinson, 2018: 193). Meluasnya propaganda oleh TNI Angkatan Darat dan oknum-oknum pendukungnya yang dipenuhi dengan sentimen anti PKI untuk menumbuhkan fobia terhadap PKI, telah mendorong terjadinya gelombang kekerasan massal. Tak terkecuali Jawa Timur, sebuah provinsi dengan korban jiwa tertinggi di Indonesia (Hearman, 2018: 4).

Layaknya kekerasan atau konflik sosial-politik pada umumnya, dampak sosial yang ditimbulkan akibat kekerasan massal tahun 1965-66 tentunya berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk sektor ekonomi. Dengan adanya hambatan dan perubahan dari suatu interaksi sosial yang umumnya terjadi sebagai akibat terjadinya kekerasan massal, maka sektor ekonomi akan mengalami perubahan. Selanjutnya, perubahan ekonomi itu tentu akan melahirkan sebuah hubungan kausalitas tertentu antara sektor ekonomi dengan interaksi sosial pada masyarakat yang terlibat di dalamnya. Salah satunya adalah masyarakat di lingkungan perkebunan. Perkebunan sendiri merupakan sebuah satuan wilayah dengan sistem pengelolaan administratif tersendiri yang sepenuhnya diciptakan dengan maksud untuk mewujudkan efektivitas dan produktivitas ekonomi suatu perusahaan. Proses nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan asing antara tahun 1957-1958 (Edward, dkk, 2010: 50) membuat ruang lingkup perkebunan menjadi ajang tumbuhnya semangat nasionalis untuk mengelola dan mengambil alih aset-aset milik asing, khususnya Belanda, di mana tidak jarang bahwa semangat tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah politisi. Proses nasionalisasi di kabupaten tempat penelitian ini dilaksanakan telah dilakukan terhadap setidaknya 24 perusahaan besar milik Belanda dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi (Aprianto, 2016: 12).

Dalam penelitian ini perkebunan yang dipilih adalah Perkebunan Ajinantra, salah satu perkebunan yang merupakan hasil nasionalisasi pada tahun 1959 di Jawa Timur. Pada periode tahun 1961 hingga 1970, perkebunan ini memiliki sebuah pabrik karet. Saat penelitian ini dilaksanakan, Perkebunan Ajinantra merupakan perkebunan dengan komoditas kopi dan karet yang telah ditanam sejak masa kolonial. Perkebunan ini dilengkapi dengan sebuah pabrik pengelolaan karet yang secara total memiliki luas lahan 2.709 ha. Perkebunan Ajinantra sendiri merupakan nama samaran dari perkebunan asli, yang atas permintaan dari narasumber namanya disamarkan. Alasannya adalah untuk menghindari adanya potensi konflik atau permasalahan lain yang dapat timbul akibat sensitifnya isu serta pokok bahasan dalam penelitian ini.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, ada tiga rumusan masalah yang ingin dijawab melalui penelitian ini, yaitu: mengapa pada tahun 1961-1970 terjadi konflik di Perkebunan Ajinantra; bagaimana berlangsungnya kekerasan pasca peristiwa G-

30-S/1965 di Perkebunan Ajinantra; dan apa dampak dari kekerasan yang terjadi pada waktu itu terhadap hasil produksi dan interaksi sosial di antara warga Perkebunan Ajinantra. Ketiga rumusan pertanyaan tersebut disusun berdasarkan pertimbangan periodisasi masa yang dikaji dalam penelitian ini. Pertanyaan pertama difokuskan untuk mengkaji periode 1961-1965; pertanyaan kedua membahas periode 1965-1966; sedangkan pertanyaan ketiga mengacu pada periode 1966-1970. Periode kajian dalam penelitian ini dimulai pada tahun 1961 karena pada tahun tersebut terjadi pembubaran beberapa partai politik, khususnya PSI dan Masyumi yang dibubarkan pada bulan April 1961 serta mulainya rangkaian konflik sebagai akibat pemogokan massal yang dilakukan oleh anggota PKI dan anggota organisasi-organisasi simpatisan PKI (Hearman, 2018: 46). Tahun 1970 dipilih sebagai batas akhir karena penangkapan massal dan interogasi masyarakat yang diduga terlibat dalam PKI dan organisasi pendukungnya mulai berakhir (Roosa, dkk, 2018: 103).

METODE PENELITIAN

Teori yang akan digunakan untuk menelaah permasalahan dalam penelitian ini adalah teori konflik (*conflict theory*) dan teori kekuasaan (*theory of power*). Dalam teori konflik, sikap atau tindakan konflik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tindakan koersif dan tindakan non koersif. Tindakan koersif dapat didefinisikan sebagai tindakan yang memaksa musuh untuk melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan dan dapat terjadi melalui ancaman atau kekerasan fisik (Roosa, 2018: 23). Sementara itu, tindakan non koersif dapat didefinisikan sebagai tindakan penelusuran solusi terhadap konflik maupun kerjasama secara murni hingga persuasi, pemberian hadiah, atau melalui kebohongan. Dalam konteks penelitian ini, konflik yang akan dianalisis adalah konflik-konflik yang dipandang terkait dengan definisi mengenai tindakan koersif maupun tindakan non koersif. Tindakan koersif mengarah pada indikasi adanya ancaman dan kekerasan fisik yang terjadi di ruang lingkup penelitian, sementara tindakan non koersif mengarah pada upaya diplomatis yang ditempuh untuk menyelesaikan suatu konflik yang ada pada masyarakat perkebunan.

Dalam penelitian ini, konsep dalam teori kekuasaan yang akan digunakan adalah konsep *power relationship*. Definisi dari *power relationship* adalah kemampuan suatu entitas untuk mempengaruhi tindakan entitas yang lain (Vail, 2004:4). Hubungan keluarga yang berkembang menjadi hubungan kerjasama yang terjadi di Perkebunan Ajinantra menunjukkan adanya *power relationship*. Dalam penelitian ini, *power relationship* mengacu pada sebuah kesepakatan atau solusi yang menguntungkan pihak Perkebunan Ajinantra pada saat kekerasan berskala nasional berlangsung mulai paruh kedua tahun 1965. Dalam studi kasus penelitian ini *power relationship* menjadi sebuah medium atau sarana bagi pihak perkebunan untuk melindungi kepentinganya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah yang terdiri atas tahap-tahap pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi sebagai metode pengumpulan data. Dalam tahapan pengumpulan sumber atau heuristik, digunakan metode pengumpulan sumber primer melalui sejarah lisan dan pengumpulan arsip. Metode sejarah lisan yang mengutamakan wawancara sebagai metode perolehan data sendiri merupakan sebuah metode ideal dalam mengungkap sejarah kekerasan yang terjadi pasca 1965 mengingat terbatasnya sumber arsip serta sifat terfragmentasinya (*fragmented*)

dan *anecdotal*-nya pengetahuan mengenai kekerasan yang terjadi (Hearman, *IJAPS*, 5 (2): 30). Pengumpulan sumber sekunder dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap sumber-sumber penulisan yang dipandang berkaitan dengan tema penelitian ini. Penelusuran sumber dari dokumen arsip juga dilakukan terutama untuk melengkapi data yang berkaitan dengan variabel penelitian berupa hasil produksi Perkebunan Ajinantra.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Konflik di Perkebunan Ajinantra, Antara 1961-1965

Kekerasan massal pasca G-30-S/1965 di lingkungan Perkebunan Ajinantra berawal dari adanya polarisasi dan ketegangan antara masyarakat perkebunan sebagaimana tercermin dalam organisasi-organisasi di dalamnya. Mendekati bulan September 1965 polarisasi dan ketegangan tersebut semakin meningkat. Pada bulan itu, dua organisasi yang ada dalam lingkungan perkebunan mendorong terjadinya polarisasi yang selanjutnya mengarah pada tertanamnya benih-benih konflik yang lahir dari adanya perbedaan kepentingan. Organisasi-organisasi yang memecah masyarakat warga perkebunan dan menimbulkan ketegangan ini dapat dibedakan menjadi dua kutub yang saling berlawanan, yaitu organisasi kiri pada satu kutub, dan organisasi para petinggi perkebunan di kutub lain. Organisasi kiri di Perkebunan Ajinantra adalah SARBUPRI (Sarekat Buruh Perkebunan Repubik Indonesia) yang telah memiliki akar kuat tidak hanya di Perkebunan Ajinantra, tetapi juga di perkebunan sekitarnya, didukung oleh organisasi Pemuda Rakyat bersifat militan, dan yang sebelum terjadinya peristiwa G-30-S/1965 berupaya untuk menginfiltrasi perkebunan-perkebunan yang ada. Adapun organisasi para petinggi perkebunan adalah PERKAPEN (Persatuan Karyawan Perkebunan).

Pada periode pra G-30-S/1965, SARBUPRI dapat bertindak semaunya terhadap para petinggi perkebunan. Organisasi sayap kiri di Perkebunan Ajinantra ini juga berada dalam posisi yang kian hari dipandang meresahkan masyarakat perkebunan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat perkebunan menjadi tegang dan secara luas dihadapkan pilihan untuk bergabung dengan SARBUPRI dan mendapatkan keistimewaan dalam lingkungan perkebunan, atau tetap setia menjalankan tugas dan wewenangnya dalam sistem masyarakat perkebunan di bawah perintah para petinggi perkebunan tetapi tidak mendapatkan keistimewaan apa-apa. Puncak dari ketegangan ini adalah terjadinya pergantian seorang administratur berdarah Belanda, sebagai pimpinan perkebunan yang merasa bahwa Perkebunan Ajinantra tidak lagi merupakan tempat aman bagi keluarga dan dirinya sendiri.

Peristiwa Kekerasan di Perkebunan Ajinantra Antara 1965-1966

Di Jawa Timur, kekerasan terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota PKI dan organisasi sayap kiri lainnya mengakibatkan terbunuhnya lebih dari 175.000 orang, dengan angka korban jiwa sangat tinggi di wilayah-wilayah yang pada Pemilu 1955 merupakan basis pendukung NU (Chandra, 2017: 309 & 316). Sebagaimana kekerasan lain yang terjadi di Jawa Timur, konflik koersif di Perkebunan Ajinantra mendukung pandangan Roosa tentang teori dualistik, atau *dualitic thesis*, yang menyatakan bahwa meskipun proses kekerasan dan pembunuhan mengikuti suatu pola yang terjadi secara nasional, terdapat perbedaan pola pembunuhan secara regional yang tidak mudah dianalisis (Rossa, 2016: 2 & 12).

Variasi ini sangat tampak pada konflik koersif yang terjadi di Perkebunan Ajinantra, yang bisa dikatakan tidak mengikuti pola-pola pada umumnya di Jawa Timur yang mengedepankan kolaborasi TNI dengan organisasi massa seperti NU (Leksana, 2020: 61). Hal ini tampak jelas dalam kasus perkebunan Ajinantra dan perkebunan-perkebunan di sekitarnya. Di perkebunan-perkebunan tersebut tidak ditemukan tanda-tanda campur tangan mendalam oleh para pengikut NU maupun para warga Pondok Pesantren yang terletak sepuluh kilometer dari Perkebunan Ajinantra dan berdiri sejak masa kolonial.

Memasuki tahun 1965, organisasi SARBUPRI berkembang menjadi organisasi yang ditakuti oleh pihak perkebunan. Ketakutan itu disebabkan oleh rangkaian tuntutan dan gerakan SARBUPRI yang mengedepankan cara-cara demonstrasi dan intimidasi kepada pihak perkebunan. Demonstrasi dan intimadisi tersebut membuat para petinggi perkebunan seperti sinder dan mandor bahkan administratur perkebunan, dengan terpaksa mengikuti dan mengabulkan tuntutan-tuntutan SARBUPRI. Tak jarang tuntutan dari SARBUPRI justru tidak berkaitan atau bahkan melenceng dari prinsip-prinsip keorganisasian untuk membela hak buruh perkebunan, seperti tuntutan pemberian jatah beras yang lebih bagi anggota SARBUPRI (Baru, wawancara, 24 April 2021).

Saat anggota SARBUPRI berdemonstrasi untuk menuntut hal-hal yang kurang relevan seperti ini, pihak perkebunan dari mandor hingga administratur sekalipun dibuat tidak berkutik karena adanya ancaman kekerasan yang terkadang dilakukan oleh anggota SARBUPRI (Baru, wawancara, 24 April 2021). Anggota SARBUPRI sendiri merupakan anggota buruh perkebunan yang bisa dikatakan kompak ketika melabrak pihak petinggi perkebunan untuk memenuhi kemauan mereka.

Konflik koersif pasca G-30-S/1965 dalam konteks masyarakat Perkebunan Ajinantra sangat berbanding terbalik dengan konflik-konflik koersif lainnya yang terjadi di Jawa Timur. Seluruh narasumber yang merupakan saksi hidup peristiwa konflik di Perkebunan Ajinantra yang diwawancarai dalam penelitian ini menyatakan bahwa tidak banyak korban jiwa yang berjatuhan, meskipun diakui bahwa Perkebunan Ajinantra layaknya lingkungan perkebunan lainnya di Jawa Timur pada saat itu, merupakan basis dari gerakan kiri (Batas, Rendi, dan Denta, wawancara, 26 dan 12 Agustus 2020).

Akumulasi informasi yang berhasil diperoleh dari para narasumber menyatakan bahwa secara keseluruhan jumlah korban jiwa dari Perkebunan Ajinantra hanya lima orang: dua orang karyawan dari bagian kantor perkebunan, seorang juru tulis, seorang mandor kebun, dan seorang pekerja kebun (Denta, wawancara, 26 Agustus 2020). Para korban itu merupakan anggota SARBUPRI yang umumnya tidak benar-benar memahami organisasi SARBUPRI.

Kendati konflik koersif tidak secara langsung menimpa masyarakat Perkebunan Ajinantra, kekerasan sebagai salah satu bentuk konflik koersif tetap terjadi di dalamnya. Konflik koersif yang terjadi itu adalah pemanfaatan lahan-lahan milik Perkebunan Ajinantra sebagai lokasi pembunuhan para anggota PKI dan simpatisannya. Konflik koersif ini membuat dijadikannya beberapa bagian dari tanah milik Perkebunan Ajinantra sebagai lokasi penguburan massal para korban kekerasan itu. Pada mulanya di lokasi-lokasi tersebut penguburan dilakukan dengan cara tetap membiarkan terbuka lubang kubur tempat

digeletakkannya mayat para korban (Baru, wawancara 24 April 2021).

Dapat diduga, tindakan semacam ini dilakukan sebagai salah satu bentuk *psychological warfare* terhadap PKI dan organisasi-organisasi kiri lainnya, selain juga dimaksudkan untuk menekan warga masyarakat agar tunduk kepada militer dan pemerintah setempat. Baru dalam perkembangan selanjutnya, proses penguburan disertai dengan penutupan lubang kubur. Penguburan dan penutupan kubur itu dikoordinasi dengan bantuan berbagai pihak (termasuk pihak perkebunan) yang ditunjuk militer untuk membantu melakukannya.

Proses kekerasan massal yang berakhir dengan jatuhnya korban jiwa di Perkebunan Ajinantra ini dilakukan dengan cukup sistematis. Seorang saksi mata pembunuhan menyatakan bahwa beberapa minggu setelah peristiwa G-30-S/1965, setiap malam akan terdengar suara truk yang melewati jalan besar di Perkebunan Ajinantra (Rendi, wawancara, 12 Agustus 2020). Adapun penggunaan truk dan dalam proses kekerasan terhadap PKI tampaknya merupakan suatu pola yang selalu diulang secara nasional.

Demikian juga dengan penggalian lubang-lubang sebagai tempat penguburan massal para korban (Robinson, 2018: 123-124). Truk-truk tersebut merupakan truk-truk militer yang digunakan untuk mengangkut para tahanan. Dalam kasus di sekitar Perkebunan Ajinantra, truk-truk digunakan untuk mengangkut para tahanan dari gudang yang difungsikan sebagai penjara, yang terletak di perkebunan sebelah utara Perkebunan Ajinantra (Madun, wawancara 25 Agustus 2020). Sumber lain menyatakan bahwa truk-truk ini merupakan truk yang dimiliki oleh pihak perkebunan (Cribb, 1991: 171).

Beberapa saksi mata menyatakan bahwa truk-truk tersebut berisi tahanan yang tangannya telah diikat dengan tali dan matanya ditutup. Dikatakan bahwa tidak lama setelah truk-truk tersebut lewat, akan terdengar suara rentetan tembakan. Suara rentetan tembakan selalu terdengar, yang terkadang terdengar dekat dan terkadang terdengar jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa lubang-lubang tempat penguburan massal tidak terletak di lokasi yang sama, melainkan sesuai dengan setiap gelombang eksekusi. Suara rentetan tembakan ini kemudian diikuti dengan suara kembalinya truk-truk militer tersebut pada jalur yang sama (Rendi, wawancara, 12 Agustus 2020).

Konflik non-koersif yang ditelusuri dalam kasus Perkebunan Ajinantra adalah kerjasama pihak militer dengan petinggi perkebunan yang terbangun karena adanya hubungan keluarga antara administratur perkebunan dengan petinggi militer batalion yang ditugaskan untuk melakukan kekerasan terhadap PKI di lingkup kabupaten tempat Perkebunan Ajinantra berada. Hubungan keluarga antara administratur Perkebunan Ajinantra dengan petinggi batalion di Jember adalah hubungan mertua dengan menantu, di mana administratur Perkebunan Ajinantra berkedudukan sebagai mertua dari petinggi batalion di Jember (Madun dan Denta dan Rendi, wawancara 25, 26, dan 12 Agustus 2020).

Hubungan keluarga yang berkembang menjadi kerja sama ini menunjukkan adanya *power relationship*. Wujud dari *power relationship* ini adalah adanya pemberian kekuasaan kepada para petinggi Perkebunan Ajinantra untuk seoptimal mungkin melindungi para pekerja Perkebunan Ajinatra, meskipun perkebunan ini merupakan salah satu basis dari organisasi-organisasi kiri. Dalam konteks ini, *power relationship* menjadi sebuah media atau sarana bagi pihak

perkebunan untuk melindungi kepentingannya dengan cara melindungi tenaga kerja yang dibutuhkan dalam tujuan mencapai tujuan utama dari Perkebunan Ajinantra, yaitu stabilitas dan peningkatan jumlah hasil produksi perkebunan.

Dampak Konflik di Perkebunan Ajinantra, Antara 1966-1970

Penangkapan massal merupakan bentuk kelanjutan dari konflik koersif yang terjadi pasca rentetan konflik untuk menghancurkan PKI dan gerakan kiri lainnya di Indonesia. Penangkapan ini dibenarkan oleh pemerintah dengan menggunakan peristiwa G-30-S/1965 sebagai dalih, yang tentunya tidak dibahas secara rinci dalam narasi sejarah dan historiografi resmi produk pemerintahan Orde Baru (Roosa, 2008: 27-28). Secara nasional, jumlah penangkapan atau penahanan massal tersebut diperkirakan berkisar antara 106.000 hingga 3 juta jiwa (Robinson, 2018: 210).

Dari sekian banyak estimasi terhadap penangkapan yang ada di Jawa Timur, dipercaya bahwa jumlah tahanan pada akhir tahun 1965 telah mencapai setidaknya 25.000 orang tahanan (Kammen, dkk, 2012: 17). Angka tersebut berasal dari sembilan orang tim pencari fakta yang diutus oleh Presiden Soekarno pada Desember 1965 (Hearman, 2018: 109-110). Angka jumlah tahanan di Jawa Timur ini tentu terus meningkat hingga penahanan akhirnya berakhir pada tahun 1970.

Berdasarkan data akumulasi wawancara selama penelitian, di Perkebunan Ajinantra hanya terjadi satu kasus penahanan terhadap pekerja. Itupun merupakan sebuah kasus salah tangkap, karena setelah satu atau dua minggu ditangkap, tahanan ini dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke Perkebunan Ajinantra untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai buruh di perkebunan tersebut (Madun, wawancara 25 Agustus 2020). Namun, pekerja ini diketahui kembali bekerja di perkebunan dengan kondisi kepala gundul dan terdapat tanda-tanda bahwa ia telah mengalami kekerasan fisik selama dalam tahanan (Madun, wawancara 25 Agustus 2020).

Kendati menyandang status sebagai eks-tapol atau mantan tahanan politik dan dikenai wajib lapor hingga beberapa bulan setelah dibebaskan, Perkebunan Ajinantra tidak ragu-ragu untuk menerima kembali pekerja tersebut, padahal perkebunan ini berada dalam lingkup perusahaan yang berafiliasi dengan negara (Madun, wawancara 25 Agustus 2020). Kasus ini dengan jelas menunjukkan bahwa Perkebunan Ajinantra sangat mengutamakan kepentingan perkebunan untuk menjaga stabilitas hasil produksi dengan cara mempertahankan jumlah dan kapasitas tenaga kerja mereka semaksimal mungkin tanpa mempedulikan status dari para pekerja dalam kaitannya dengan kekerasan massal yang telah terjadi.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa salah satu masalah yang menjadi latar belakang terjadinya ketegangan dan konflik di Perkebunan Ajinantra pasca G-30-S/1965 adalah masalah tanah. Tentang hal ini setidaknya terdapat dua versi narasi yang berbeda tentang asal muasal masalah tanah tersebut. Versi pertama dari narasi itu mengatakan bahwa sengketa tanah di Perkebunan Ajinantra merupakan akibat dari upaya pihak perkebunan untuk mengambil alih kembali asetnya yang dihuni oleh eks-anggota PKI dan eks-anggota organisasi-organisasi kiri lainnya yang menempati lahan milik Perkebunan Ajinantra karena sebelumnya telah diusir dari Perkebunan Kalisanen yang letaknya tidak jauh dari Perkebunan Ajinantra itu sendiri (Diandra, wawancara, 19 Agustus 2020).

Sementara versi kedua dari narasi mengenai masalah tanah tersebut mengatakan bahwa sekitar tahun 1965, Perkebunan Ajinantra melaksanakan penertiban daerah pemukiman penghuni dan penggarap tanah milik perkebunan dengan cara meminta mereka pergi, tetapi dengan memberikan ganti rugi sejumlah nominal antara Rp 100.000 hingga Rp 200.000 per hektar yang diberikan dalam rentang waktu antara tahun 1965 dan 1997 (Fausi, 220: 55).

Interaksi Sosial Perkebunan Ajinantra Antara 1961-1970

Setelah terjadinya kekerasan pasca peristiwa G-30-S/1965 di Jakarta, interaksi sosial antara warga masyarakat di sekitar Perkebunan Ajinantra mengalami ketegangan yang semakin meningkat. Menurut para narasumber, anggota keluarga para petinggi perkebunan menjadi tidak berani keluar rumah dan mengutus para pembantu atau pesuruh mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Rendi, wawancara 12 Agustus 2020).

Diberlakukannya jam malam dan pemadaman listrik pada malam hari di seluruh wilayah perkebunan membuat masyarakat di sekitar Perkebunan Ajinantra menjadi semakin curiga satu sama lain dan membatasi interaksi sosial mereka. Timbul suatu kebiasaan untuk tidak tidur sebelum truk-truk militer melewati Perkebunan Ajinantra (Rendi, wawancara 12 Agustus 2020). Kebiasaan tersebut dilakukan oleh seluruh warga masyarakat di Perkebunan Ajinantra, baik yang berkedudukan sebagai petinggi perkebunan maupun yang bekerja sebagai buruh perkebunan (Batas, wawancara 26 Agustus 2020).

Kendati interaksi sosial masyarakat menjadi sangat dibatasi demi menjamin keselamatan pribadi dan keluarga akibat meningkatnya rasa saling curiga tersebut, para petinggi Perkebunan Ajinantra cenderung bersikap melindungi. Akibatnya tidak jarang terjadi ketegangan antara pihak perkebunan dengan warga masyarakat. Dalam salah satu kasus misalnya, terdapat seorang pekerja perkebunan yang dilaporkan karena keterlibatannya dalam organisasi sayap kiri (Madun, wawancara, 25 Agustus 2020). Menanggapi laporan itu para petinggi perkebunan secara terang-terangan memutuskan untuk melindungi pekerja yang dilaporkan itu, padahal hampir semua pekerja perkebunan mengetahui bahwa orang tersebut adalah mantan anggota organisasi sayap kiri (Denta, wawancara 26 Agustus 2020).

Interaksi sosial di Perkebunan Ajinantra kembali normal setelah memasuki tahun kedua pasca meletusnya peristiwa G-30-S/1965 (Madun, wawancara 25 Agustus 2020). Namun proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang, mengingat bahwa selama dua tahun terjadi penyebaran rasa takut di lingkungan masyarakat perkebunan. Selama periode itu para petinggi perkebunan muncul sebagai sosok yang ditakuti oleh para pekerja perkebunan, terutama oleh mereka yang telah terbukti terlibat dalam kegiatan organisasi-organisasi garis kiri namun menerima sejenis pengampunan atau amnesti lewat kebijakan para petinggi tersebut. Pada periode yang sama, para petinggi perkebunan sendiri juga merasa tidak aman, sebagaimana tampak dalam fakta bahwa setiap kali mereka bepergian atau melakukan perjalanan ke luar perkebunan, mereka selalu meminta pengawalan khusus dari pihak militer (Baru, wawancara 24 April 2021).

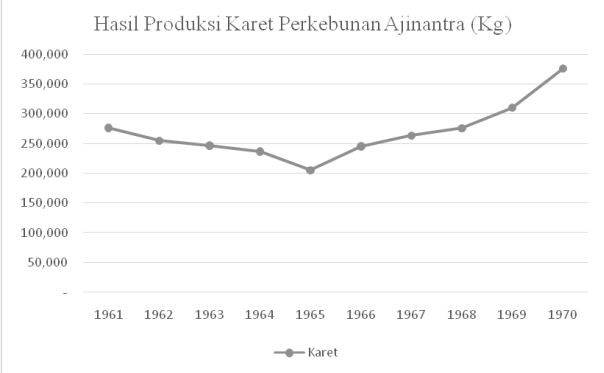
Dinamika kembalinya interaksi sosial masyarakat perkebunan dapat dilihat antara lain melalui perubahan yang terjadi dalam cara pemberitaan di majalah *Dinamika Perkebunan* yang pada waktu itu merepresentasikan situasi perkebunan secara

nasional. Adapun perubahan ini dapat dilihat dari perubahan pilihan kata, sifat pemberitaan, dan tujuan dari pemberitaan itu sendiri. Sebelumnya, secara khusus sejak 1 Oktober 1965, majalah ini memiliki peran yang sangat krusial sebagai media mobilisasi massa untuk kepentingan militer (McGregor, dkk, 2017: 11).

Seperti media massa serupa, majalah *Dinamika Perkebunan* sering menampilkan PKI dan organisasi-organisasi kiri lain sebagai suatu entitas yang berbahaya bagi masyarakat dan oleh karena itu harus dimusuhi bersama (McGregor, dkk, 2017: 12). Pada periode yang sama di Indonesia media massa radio juga sering digunakan sebagai alat "operasi propaganda gelap" yang dipengaruhi oleh Amerika, Inggris, dan Australia (Melvin, 2018: 10). Namun propaganda itu tidak menjangkau masyarakat perkebunan, termasuk masyarakat Perkebunan Ajinantra, mengingat bahwa hingga tahun 1970 tidak banyak warga masyarakat perkebunan yang memiliki radio.

Dinamika Hasil Produksi Perkebunan Ajinantra Antara 1961-1970

Dalam kaitannya antara produksi karet dari Perkebunan Ajinantra dengan peristiwa G-30-S/1965, penelitian ini menemukan bahwa ketegangan dan kekerasan massal yang terjadi akibat peristiwa tersebut mempengaruhi produksi perkebunan, khususnya produksi karet. Grafik 1 menunjukkan temuan tersebut. Tampak bahwa sejak tahun 1961 produktivitas karet di Perkebungan Ajinantra terus mengalami penurunan, di mana produktivitas itu mencapai titik paling rendah pada tahun 1965, yakni tahun mulai terjadinya kekerasan massal pasca-peristiwa G-30-S/1965.



Grafik 1. Hasil Produksi Karet Perkebunan Ajinantra antara tahun 1961-1970

Daftar Produksi dan Curah Hujan Tahun 1958 s/d 1971, 1972.

(Sumber: *Perkebunan Ajinantra/ Pangdalemsuto*. Tanpa keterangan tempat terbit dan penerbit.)

Tabel 1. Hasil Produksi Karet di Perkebunan Ajinantra Tahun 1961-1970

Tahun	Hasil Produksi Karet (kilogram)
1961	276.073
1962	254.503
1963	246.147
1964	236.750
1965	205.282
1966	244.988
1967	263.308
1968	275.543
1969	309.961
1970	375.260

(Sumber: *Perkebunan Ajinantra/ Pangdalemsuto. Daftar Produksi dan Curah Hujan Tahun 1958 s/d 1971, 1972.* Tanpa keterangan tempat terbit dan penerbit.)

Dari grafik dan tabel di atas tampak bahwa antara tahun 1961-1965 tren produksi karet di Perkebunan Ajinantra menurun. Menurunnya hasil produksi ini dapat dipahami sebagai salah satu akibat dari kondisi sosial perkebunan yang memanas antara tahun 1961-1965 akibat meningkatnya rasa kecurigaan terhadap kegiatan dan organisasi beraliran kiri yang ada di

perkebunan ini. Berdasarkan akumulasi data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, penurunan tersebut merupakan dampak dari konflik yang berlangsung di Perkebunan Ajinantra sebelum terjadinya peristiwa G-30-S/1965 di Jakarta.

Hasil produksi karet di Perkebunan Ajinantra mengalami peningkatan yang konsisten pada saat secara nasional kekerasan massal terhadap mereka yang dituduh berhalauan kiri sedang berlangsung. Pada periode antara tahun 1965 dan 1966 misalnya, terjadi peningkatan hasil produksi karet sejumlah 39.706 kg. Padahal saat itu Perkebunan Ajinantra sedang dilanda konflik koersif dan non-koersif yang melibatkan sebagian kecil penghuninya dan berujung pada pemanfaatan beberapa lokasi milik Perkebunan Ajinantra sebagai tempat dieksekusi dan dikuburkannya mereka yang dibunuh dengan alasan keterlibatan dalam kegiatan PKI. Peningkatan jumlah produksi karet mulai tahun 1961 mengindikasikan keberhasilan pihak pengelola perkebunan untuk menjaga stabilitas perkebunan dalam rangka menaikkan produktivitas di tengah berlangsungnya kekerasan pasca G-30-S/1965 di Jakarta.

Tahun 1965 menjadi titik balik hasil produksi dari tren penurunan menjadi tren peningkatan. Adapun tren peningkatan pasca 1965 dapat dipahami sebagai akibat dari empat faktor yakni pertama, faktor keberhasilan para petinggi Perkebunan Ajinantra dalam menekan jumlah korban dan mempertahankan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki perkebunan; kedua, faktor transformasi perkebunan dari instansi yang terbuka menjadi *Markas Orde Baru* sebagaimana tampak dalam pemanfaatan perkebunan secara optimal sebagai sebuah kapital yang harus menghasilkan keuntungan finansial, bahkan kalau harus melalui cara-cara yang represif.

Sementara faktor ketiga, adalah ketiadaan organisasi-organisasi yang dipandang menghambat kerja perkebunan seperti SARBUPRI; dan faktor keempat adalah meningkatnya jumlah tanah yang dimiliki oleh perkebunan pasca peristiwa G-30-S/1965. Terkait dengan faktor ketiga, tiadanya organisasi-organisasi kiri menandakan tidak adanya upaya yang memang harus diakui kontra-produktif, terutama dalam kasus Perkebunan Ajinantra. Penetapan PERKAPEN menjadi organisasi tunggal perkebunan bisa dipandang sebagai kelanjutan dari faktor ketiga.

KESIMPULAN

Data hasil produksi Perkebunan Ajinantra antara 1961-1970 mencerminkan dinamika konflik di Perkebunan Ajinantra pasca peristiwa G-30-S/1965. Menurunnya hasil produksi perkebunan sejak tahun 1961 dapat dipandang sebagai akibat dari adanya konflik sosial yang terjadi sebelum adanya peristiwa G-30-S/1965 di Jakarta. Konflik sosial itu dapat dipandang sebagai konflik koersif yang dilakukan oleh SARBUPRI dalam bentuk tekanan dan pemaksaan. Pasca peristiwa G-30-S/1965 di Jakarta, konflik yang terjadi di Perkebunan Ajinantra mencakup konflik koersif maupun konflik non-koersif.

Konflik koersif terjadi dalam bentuk penggunaan lahan di Perkebunan Ajinantra sebagai tempat eksekusi mereka yang dituduh sebagai anggota PKI dan organisasi sayap kiri lainnya, serta mereka yang dituduh sebagai simpatisan organisasi-organisasi tersebut. Kendati kekerasan massal yang menimbulkan korban jiwa terjadi di Perkebunan Ajinantra, namun jumlah anggota masyarakatnya yang menjadi korban sangatlah sedikit, yakni kurang dari sepuluh orang.

Masyarakat Perkebunan Ajinantra sendiri terlibat dalam kekerasan massal ini, khususnya sebagaimana tampak dalam

penggunaan truk-truk milik perkebunan yang digunakan untuk mengangkut para tahanan dari luar Perkebunan Ajinantra, serta dikerahkannya buruh-buruh perkebunan untuk membantu pembunuhan dan penguburan para korban. Namun demikian, jumlah korban di antara warga masyarakat perkebunan, sekali lagi, relatif sedikit.

Konflik non-koersif terjadi dalam bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh Perkebunan Ajinantra untuk seoptimal mungkin menekan angka korban jiwa dari antara warga masyarakat perkebunan. Oleh pihak petinggi perkebunan hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas perkebunan, yang dengan demikian menjaga kepentingan perkebunan itu sendiri. Upaya menekan jumlah korban jiwa memang berhasil diwujudkan. Keberhasilan itu menjadi mungkin karena adanya hubungan keluarga antara administratur perkebunan dengan batalion yang ditugaskan untuk melakukan operasi pembunuhan atas mereka yang dituduh sebagai PKI di kabupaten tempat Perkebunan Ajinatra berada.

Dalam kasus Perkebunan Ajinantra, baik konflik koersif maupun non-koersif tidak menimbulkan banyak korban. Hal ini antara lain tampak dari tidak adanya tahanan politik yang berasal dari lingkungan Perkebunan Ajinantra itu sendiri, kecuali satu kasus, itupun kasus salah tangkap. Tiadanya tahanan politik ini terutama disebabkan oleh adanya faktor perlindungan terhadap para warga masyarakat perkebunan oleh pihak petinggi perkebunan.

Kekerasan yang terjadi pasca-peristiwa G-30-S/1965 di Jakarta membawa dampak signifikan bagi hasil produksi karet Perkebunan Ajinantra. Hasil produksi perkebunan yang terus menurun sejak tahun 1961 hingga tahun 1965, dan kemudian meningkat sejak saat itu, menunjukkan bahwa upaya para petinggi perkebunan untuk meminimalisasi kekerasan sosial di Perkebunan Ajinantra membuahkan hasil positif.

Peningkatan pasca peristiwa 1965 ini merupakan suatu fakta yang mengejutkan, mengingat bahwa sebuah peristiwa kekerasan sosial biasanya mengakibatkan menurunnya hasil produksi suatu perkebunan. Kekerasan sosial yang terjadi di Perkebunan Ajinantra dapat dipahami sebagai suatu pemicu yang membuat pekerja perkebunan berhasil meningkatkan daya kerjanya akibat ketakutan terhadap para petinggi perkebunan yang diketahui memiliki kekuasaan akibat *power relationship*.

Hal ini tentu berkaitan dengan kondisi interaksi sosial yang terjadi di Perkebunan Ajinantra. Masyarakat merasa ketakutan mengingat pada masa awal konflik pasca-terjadinya peristiwa G-30-S/1965 di Jakarta, kalangan militer secara luas melakukan sebuah *psychological warfare* terhadap masyarakat perkebunan. *Psychological warfare* yang dilakukan militer itu pada gilirannya memicu rasa takut yang meluas di kalangan warga masyarakat. Dalam kasus Perkebunan Ajinantra, rasa takut yang meluas itu mendorong meningkatnya produksi karet.

DAFTAR PUSTAKA

Aprianto, Tri C. 2011. "Dekolonialisasi Perkebunan di Jember Tahun 1930an-1960an". *Tesis*. Depok: Universitas Indonesia.

Chandra, Siddharth. "New Findings on the Indonesian Killings of 1965-66", *Journal of Asian Studies*, 76(4), hlm. 307-330

Cribb, Robert. 1991. *The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali*. Clayton: Monash University.

Edward, Aspinall, et al. 2010. *Soeharto's New Order and its Legacy*. Canbera: ANU E-Press.

Fausi, Ahmad. 2020. "Strategi Mediasi Badan Pertanahan Nasional Jember Dalam Penyelesaian Konflik Tanah (Studi Deskriptif di Desa Cueahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)". *Skripsi Sarjana*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Hearman, Vannesa. 2018. *Unmarked Graves: Death and Survival in the Anti-Communist Violance in East Java, Indonesia*. Singapura: NUS Press.

Hearman, Vannesa. 2012. "The Uses of Memoirs and Oral History works in Researching the 1965-1966 political violence in Indonesia", *IJAPS*, 5(2), hlm. 21-42

Kammen, Douglas, dkk. 2012. *The Contours of Mass Violence in Indonesia 1965-68*. Singapura: National University of Singapore.

Leksana, Grace. 2020. "Collaboration in Mass Violence: The Case of the Indonesian Anti-leftist Mass killings in 1965-66 in East Java", *Journal of Genocide Research*, 23(1), hlm. 58-80.

McGregor, Katharine, dkk. 2017. *The Indonesian Genocide of 1965: Cause, Dynamics, and Legacies*. Cham: Pallgrve Macmillan.

Melvin, Jess. 2018. *The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder*. New York: Routledge

Perkebunan Ajinantra/Pangdalemsuto. *Daftar Produksi dan Curah Hujan Tahun 1958 s/d 1971*, 1972. Tanpa tempat terbit dan penerbit.

Robinson, G. F. 2018. *The Killing Season a History of The Indonesian Massacres, 1965-66.* Princeton: Princeton University Press.

Roosa, John. 2008. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia.

Roosa, John. 2016. "The State Knowledge about an Open Secret: Indonesia's Mass Disapperances of 1965-1966", *Journal of Asian Studies*, 75(2). hlm. 281-297

Roosa, John, dkk. 2018. *Tahun yang tak pernah berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65*. Jakarta: Elsam.

Vail, Jeff. 2004. *A Theory of Power*. New York: iUniverse.

Narasumber

No	Nama	L/P	Usia (tahun)	Profesi/Peran	Alamat
1	Rendi (nama samaran) 12 Agustus 2020	L	62	Wiraswasta	Dirahasiakan atas permintaan Narasumber
2	Madun (nama samaran)[1] 25 Agustus 2020	L	64	Pensiunan Pekerja Perkebunan Ajinantra	Dirahasiakan atas permintaan Narasumber

[1] Madun meninggal pada tahun 2021.

3	Denta (nama samaran) 26 Agustus 2020	P	±70-75	Pensiunan Pembantu Rumah Tangga Perkebunan Ajinantra	Dirahasiakan atas permintaan Narasumber
4	Diandra (nama samaran) 19 Agustus 2020	L	62	Pensiunan Administratur Perkebunan Ajinantra	Dirahasiakan atas permintaan Narasumber
5	Baru (nama samaran) 24 April 2021	L	76	Pensiunan Supir Perkebunan Pangdalemsuto	Dirahasiakan atas permintaan Narasumber
6	Batas (nama samaran) 26 Agustus 2020	L	59	Pensiunan Pekerja Perkebunan	Dirahasiakan atas permintaan Narasumber